



*Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 195 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 153 TAHUN 2022
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD, dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
- b. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2023 yang telah ditetapkan berjumlah 35 (tigapuluh lima) judul raperda sampai saat ini pembahasan raperda yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta bersama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta masih berproses dalam pembahasan, sehingga Propemperda Tahun 2023 perlu diubah;
- c. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta bersama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, telah meneliti, menyusun dan membahas perubahan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 153 Tahun 2022 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023;

- Meringat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 12007);

Memperhatikan: Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tanggal 31 Oktober 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 153 TAHUN 2022 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2023.

Pasal I

Mengubah diktum KESATU dan diktum KEDUA dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 153 Tahun 2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023, sehingga berbunyi sebagai berikut:

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 sebanyak 19 (sembilan belas) rancangan Peraturan

Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu terdiri dari:

- a. 6 (enam) raperda yang telah selesai dibahas;
- b. 6 (enam) raperda yang sedang dibahas; dan
- c. 7 (tujuh) raperda dalam proses penjadwalan pembahasan.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 November 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KETUA,



H. PRASETIO EDI MARSUDI, S.H

Tembusan :

1. PJ. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
3. Para Ketua Fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta
4. Para Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta
5. Plt. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
 NOMOR : 195
 TAHUN : 2023
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI DAERAH KHUSU IBUKOTA JAKARTA NOMOR 153 TAHUN 2022 TENTANG
 PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 TAHUN 2023

USULAN PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 TAHUN 2023

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	PERUBAHAN		NASKAH AKADEMIS	PENJELASAN/ KETERANGAN			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Peraturan Daerah	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Perubahan alokasi program dan penganggaran kegiatan tahun 2023	-	√	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	-	√	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Triwulan III	Selesai
2	Peraturan Daerah	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Realisasi APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022 dan LKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022	√	-	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	-	√	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Triwulan IV	Selesai
3	Peraturan Daerah	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas Jakarta Properindo (Perseroan Daerah)	Penambahan ketentuan pembentukan anak perusahaan yang menerima dan mengelola <i>Participating Interest</i> 10 % (sepuluh persen)	-	√	Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah	-	√	BPPUMD, Biro Perencanaan dan Keuangan	Triwulan I	Selesai

4	Peraturan Daerah	Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jakarta Menjadi Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jakarta (Perseroan Daerah)	Perubahan terkait ketentuan modal perusahaan dan ruang lingkup perseroan	√	-	Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah	√	-	BPPUMD, Biro Perencanaan dan Keuangan	Triwulan I	Selesai
5	Peraturan Daerah	Perubahan Bentuk Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya Menjadi Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya (Perseroan Daerah)	Perubahan terkait ketentuan modal dasar dan ruang lingkup perseroan	√	-	Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah	√	-	BPPUMD, Biro Perencanaan dan Keuangan	Triwulan I	Selesai Pembahasan /Fasilitasi Kemendagri
6	Peraturan Daerah	Rencana Umum Energi Daerah Provinsi DKI Jakarta	Visi, Misi, Tujuan Sasaran Energi Daerah, Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Energi Daerah yang dijabarkan dalam matriks program Rencana Umum Energi Daerah, dasar hukum pembentukan lembaga atau forum yang membahas pelaksanaan dari RUED	√	-	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Rencana Umum Energi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional	√	-	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	Triwulan I	Selesai Pembahasan /Fasilitasi Kemendagri

7	Peraturan Daerah	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Alokasi program dan penganggaran kegiatan tahun 2024	√	-	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	-	√	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Triwulan IV	Pembahasan
8	Peraturan Daerah	Jaringan Utilitas	Pengaturan penataan ruang melalui perencanaan penempatan jaringan utilitas dan prioritas SJUT, alternatif mekanisme penyediaan, tarif layanan SJUT, bentuk-bentuk perizinan, jaminan pelaksanaan atau perbaikan, penguasaan lembaga pengawas jaringan utilitas, kewajiban	√	-	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penataan Ruang	-	-	Dinas Bina Marga	Triwulan I	Pembahasan
9	Peraturan Daerah	Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik	Manajemen kebutuhan lalu lintas berdasarkan kriteria perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan, ketersediaan jaringan dan pelayanan angkutan umum, serta kualitas lingkungan	√	-	Delegasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi	√	-	Dinas Perhubungan	Triwulan I	Bapemperda

10	Peraturan Daerah	Rencana Induk Transportasi Jakarta	Perencanaan sistem transportasi baru dalam rangka menunjang dan menggerakkan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi DKI Jakarta	√	-	Delegasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi	√	-	Dinas Perhubungan	Triwulan I	Pembahasan
11	Peraturan Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Seluruh aktivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai turunan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang akan mencabut Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah	√	-	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan	√	-	Badan Pengelolaan Aset Daerah	Triwulan I	Pembahasan
12	Peraturan Daerah	Pencabutan Perda Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penataan dan Pengelolaan Kepulauan Seribu Kotamadya Jakarta Utara	Perda sudah tidak relevan dengan nomenklatur pembagian wilayah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia	√	-	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia	√	-	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	Triwulan I	Menunggu Pembahasan

13	Peraturan Daerah	Pencabutan Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan diatur berdasarkan kewenangan Kepala Daerah	√			Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	-	√	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Triwulan I	Menunggu Pembahasan
14	Peraturan Daerah	Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan	Penyesuaian berkenaan dengan masa bakti pengurus LMK yang sebelumnya 3 (tiga) tahun menjadi 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau secara tidak berturut-turut serta dilarang merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik dan revisi Pasal 17 terkait kedudukan Sekretariat LMK yang sulit	-	√		Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	√	Biro Pemerintahan	Triwulan I	Menunggu Pembahasan

15	Peraturan Daerah	Kawasan Tanpa Rokok	Pengaturan kawasan tanpa rokok, hak dan kewajiban, penandaan, pembinaan dan pengawasan, peran masyarakat dan sanksi	√	-	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	√	-	Dinas Kesehatan, Biro Kesejahteraan Sosial	Triwulan I	Menunggu Pembahasan
16	Peraturan Daerah	Penyelenggaraan Sistem Pangan	Menjamin ketersediaan pangan yang cukup dan aman, menjamin stabilitas ketersediaan pangan pokok dan strategis/ penting, memastikan kelancaran logistik dan distribusi pangan, menciptakan kondisi kondusif bagi usaha dalam alur sistem pangan/rantai pasok agribisnis pangan, kemudahan akses bagi kelompok rawan/rentan pangan dan gizi, mendorong terpenuhinya kecukupan gizi perseorangan/masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif	√	-	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pangan	√	-	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	Triwulan I	Menunggu Pembahasan

17	Peraturan Daerah	Pengelolaan Air Limbah Domestik	Pengaturan tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD), SPALD-T, tugas dan wewenang Pemda, hak dan kewajiban, kelembagaan, pembiayaan, kerja sama, perizinan, tarif, insentif, pembinaan dan pengawasan, data dan informasi, kompetensi,	√	-	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	√	-	Dinas Sumber Daya Air, Biro Pengembangan dan Lingkungan Hidup	Triwulan I	Pembahasan
18	Peraturan Daerah	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah	√	-	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah	√	-	Badan Pendapatan Daerah	Triwulan II	Menunggu Pembahasan
19	Peraturan Daerah	Penyelenggaraan Bantuan Hukum	Mengatur penyelenggaraan bantuan hukum di Provinsi DKI Jakarta	√	-	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum	√	-	Biro Hukum	Triwulan II	Proses Surat Gubernur

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS-JABODETABEK
JAKARTA
KETUA

H. PRASETIO EDI MARSUDI, S.H.